

Jenis Berkas	Press Release	No. Arsip	PR.01.20/01-14
Judul	Catatan Akhir Tahun, Banjir Utang pemerintah Indonesia.	Tanggal	20 Januari
Sub Judul		Tahun	2014
Event Terkait		Penulis	Uchok sky Khadafi
Kata Kunci	APBN		

Pemerintah Banjir Utang: Setiapsatu orang Penduduk, punya utang sebesar Rp.8.9 juta!

Pada akhir tahun 2013 atau memasuki akhir Pemerintah Sby, Pemerintah mempunyai utang sebesar Rp. 2.277 triliun. utang ini belum termasuk deficit APBN 2014 sebesar Rp.175.3 Triliun.

Utang dari defesit anggaran yang disengajaini, maupun utang untuk keperluan pembangunan lain sangat memberatkan rakyat sendiri, dimana, kalau dibagi rata-rata setiap satu penduduk, dengan jumlah total pada tahun 2013 sebanyak 255 juta, maka setiap penduduk mempunyai utang sebesar Rp.8.9 juta perorang. Dan bisa dijelaskan sebagai berikut:

tahun	posisiUtang	penduduk	setiapsatupendudukpunyahutang
2013	2.277.000.000.000.000	255.587.718	8.908.879
2012	1.978.000.000.000.000	255.587.718	7.739.026
2011	1.809.000.000.000.000	255.587.718	7.077.805
2010	1.682.000.000.000.000	237.641.326	7.077.894
2009	1.591.000.000.000.000	237.641.326	6.694.963
2008	1.637.000.000.000.000	237.641.326	6.888.533
2007	1.389.000.000.000.000	237.641.326	5.844.943
2006	1.302.000.000.000.000	237.641.326	5.478.845
2005	1.313.000.000.000.000	237.641.326	5.525.133
2004	1.300.000.000.000.000	237.641.326	5.470.429
2003	1.232.000.000.000.000	237.641.326	5.184.283

Sumber: seknas FITRA diolah dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI.

Dari penjelasan diatas, seknas FITRA mempunyai catatan sebagai berikut:

1). Utang pemerintah ini sangat mensengsarakan rakyat karena, Sampai dengan 31 Desember 2012, Pemerintah telah menandatangani delapan perjanjian pinjaman siaga dengan World Bank, ADB, JBIC dan Pemerintah Australia dengan total komitmen sekitar USD10.5 Miliar. Sampai tahun pengelolaan 2012, pinjaman siaga baru dimanfaatkan sebesar JPY35 miliar (setaradengan USD 350 Juta) melalui penerbitan JBIC guaranteed samurai bonds (shibosai) di pasar keuangan Jepang.

Jadi, Pinjaman siaga lainnya sampai belum dimanfaatkan,dengan demikian, Selama tahun 2012, Pemerintah telah mengeluarkan biaya untuk membayar biaya komitmen maupun biaya front-end atas pinjaman siaga yang belum dimanfaatkan tersebut sebesar Rp87,43 miliar. Dan biaya frond-end sebesar Rp.87,43milyar berarti rakyat yang harusbayar!

2). Khusus untuk pemerintah SBY. Pada saat mulai Pemerintah Megawati berakhir era berkuasanya, maka posisi utang tahun 2013 sebesar Rp.1.232 triliun. Saat mulai SBY berkuasa posisi utang sebesar Rp.1.300 Triliun, dan sampai tahun 2013, posisi utang sampai sebesar Rp.2.277 Triliun. maka selama Sby Memegang jabatan presiden utang bertambah sebanyak Rp.1.045 triliun.

3). Posisi Utang sebesar Rp.2.277 triliun selalu dianggap aman bagi pemerintah dengan memberikan ukuran indicator rasio utang terhadap PDB. Dimana, saatini indicator rasio terhadap PDB sekitar 31 sampai 29 persen, antara tahun 2009 sampai 2013. Tetapi harus diingat ketika pemerintah ordebaru berkuasa, rasio utang terhadap PDB juga antara tahun 1990 – 1996, rasio utang terhadap PDB terseb utcuk upstabil pada kisaran 20% -30%. Seiring dengan krisis ekonomi tahun 1997 –1998, rasio tersebut mengalami kenaikan dengan rasio tertinggi sebesar 88,8% pada tahun 2000.Jadi rasio utang terhadap PDB selalu tidak valid, dan mengelembui public karena, pertama, kekayaan orang kaya ikut mereka hitung, dan mata uang Rupiah tidak ada harga di pasaran international sehingga ketika dollar naik, dan rupiah terpuruk, maka rasio utang juga ikut naik.

Jadi dari penjelasan diatas, lebih baik pemerintah untuk melakukan Moratorium utang dari pada menyuguhkan indicator rasio utang terhadap PDB. Agar utang pemerintah bisa berkurang, dan rakyat tidak membayar utang sebesar Rp.8.9 juta perorang.

Kemudian, bertambahnya utang untuk setiap tahun, juga kesalahan DPR karena tidak melakukan pengetatan anggaran atau APBN untuk setiap tahun.Anggaran selalu direkayasa untuk defesit agar bisa ditutupi oleh utang. Padahal, DPR bisa melakukan penghematan dengan melakukan misalnya, pengurangan anggaran operasional menteri atau pengurangan perjalanan dinas menteri atau bisa juga melakukan pengurangan perjalan dinas presiden, yang pada tahun 2012 sampai menghabiskan anggaran sebesar Rp.202.2 milyar hanya untuk Carter Pesawat dalam rangka Penerbangan Khusus (Pensus) dan Kunjungan Kerja Presiden. Ini sungguh terlalu!!! Dan, realisasi anggaran sebesar Rp.202.2 milyar diberikan untuk bencana banjir, untuk Jakarta, dan Manado saja, bisa mengurangi beban penderitaan rakyat, dan membantu rehabilitas rumah-rumah mereka yang rusak, sudah lebih dari cukup.

Jakarta, 19 Januari 201

Uchok Sky Khadafi

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA